

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pembentukan kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga ditegaskan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh perundangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi, selaras dan seimbang supaya dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dinyatakan bahwa titik berat otonomi diletakan pada daerah tingkat II dengan pertimbangan bahwa daerah tingkat II lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah:

1. Untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.
2. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Prawirosetoto (2002), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*)

maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public services*).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001):

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah/wilayah mereka.
2. Tidak dapat dipraktikannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralisasi untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.

3. Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll.
4. Mobilitas sumberdaya, mobilisasi pada bantuan dan sumberdaya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat diantara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Nanga, 2001). Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data PDB atau pendapatan.

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*), dapat dikatakan dengan rumus sebagai berikut (Nanga, 2001);

$$g = \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana: g = Pertumbuhan Ekonomi

Y_t = PDB tahun sekarang

Y_{t-1} = PDB tahun yang lalu

2.2.2. Teori dan Model Pertumbuhan Ekonomi

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .

a. Teori Inovasi Schum Peter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi *entrepreneur* sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

b. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju

pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

c. Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antar-industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah.

d. Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak (padat) penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

e. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tinggi.

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus dan Jhon Stuart Mil), maupun ekonom neo klasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah

stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Proses pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh suatu kombinasi yang kompleks dari sejumlah faktor ekonomi, sosial termasuk pendidikan dan ketrampilan, demografi, geografi, politik, kebijakan politik dan faktor lainnya. Di dalam teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bisa dikelompokkan menjadi faktor dari sisi penawaran, seperti kemajuan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan faktor dari sisi permintaan, seperti peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen.

2.3. Pengeluaran Pemerintah

2.3.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Pengeluaran pemerintah juga dapat diartikan sebagai anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengeluaran.

Pengeluaran Pemerintah dibagi atas dua (2) yaitu; pengeluaran pemerintah yang konsumtif (Pengeluaran rutin) dan pengeluaran pemerintah yang non-konsumtif (Pengeluaran pembangunan).

2.3.1.1. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non-konsumtif berbentuk investasi (proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun proyek non fisik. Pengeluaran pembangunan di bagi dalam:

- Pengeluaran untuk pembiayaan departemen atau lembaga
- Pengeluaran pembiayaan daerah
- Pengeluaran pembiayaan lain-lain
- Pengeluaran pembiayaan bantuan proyek

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2000; Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.

2.3.1.2. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Rutin atau pengeluaran konsumtif pemerintah adalah pengeluaran yang mencakup belanja pegawai, penyusutan maupun belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran rutin lainnya), baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi. Pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) untuk belanja barang tersebut terdiri dari; pembelian alat-alat tulis, barang cetakan dan alat-alat rumah tangga; kantor; sewa gudang dan kantor; biaya

pengepakan, pengiriman, dan penyimpanan barang; biaya rapat; biaya penerimaan tamu; biaya listrik, telepon, teleks, dan air; biaya pemeliharaan gedung dan kantor; biaya pemeliharaan kendaraan dan inventaris kantor; biaya perjalanan dinas; bunga dan cicilan hutang dalam negeri, yang sebagian besar merupakan pembayaran atas tunggakan rekening telepon, listrik, air dan lain-lain, dan pengeluaran rutin lainnya.

2.3.2. Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Secara makro teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi tiga (3) golongan (Mangkoesoebroto, 1995);

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave ini menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Tahap awal, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pemerintah harus menyediakan berbagai macam prasarana. Tahap menengah, investasi swasta semakin besar, namun investasi pemerintah tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan. Tahap lanjut, aktifitas ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktifitas sosial.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap *Gross National Product* (GNP) yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, adapun Hukum Wagner tersebut dinyatakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{PkPP1}{PPk1} < \frac{PkPP2}{PPk2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPkn}$$

PkPP : Pengeluaran Pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1,2,...,n : Jangka Waktu (tahun)

Menurut Hukum Wagner, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat, dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadi kegagalan pasar dan eksternalitas negatif menjadi semakin besar dan secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat.

Ada lima (5) hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu; tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang

mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisien birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu memperbesar pengeluarannya, sedangkan masyarakat tidak senang membayar pajak yang semakin besar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori ini juga didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Adapun teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan otonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat, meskipun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat. Jadi, dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, misalnya oleh karena perang eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar.

2.3.2.1 Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X-M)$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Dumarry, 1996). Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta.

Ahli ekonomi publik klasik telah lama menaruh perhatian pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara baik pada negara berpendapatan rendah atau tinggi.

Secara teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan pada barang lain.

2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah sebagai sebuah organisasi melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian yang berguna untuk menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus lain, pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu, yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, pelabuhan, hukum dan lembaga sosial yang meningkatkan hubungan pertukaran dan produktifitas sosial dengan menjamin kepemilikan. Selain itu, pemerintah perlu memiliki wewenang memindahkan dan mengatur eksternalitas negatif.

Pemerintah juga menyediakan infrastruktur ekonomi guna memperlancar pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi. Pembayaran transfer dapat membantu mengatur keseimbangan sosial dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Perlindungan dari eksploitasi luar negeri dan pertahanan militer juga meningkatkan keamanan modal yang akan maupun telah ditanam. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan berguna untuk meningkatkan etos kerja dan produktifitas kerja. Subsidi yang diberikan akan memperbaiki neraca pembayaran bagi komoditi ekspor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semua hal diatas adalah

aktivitas pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi secara positif peningkatan total output (PDB).

Disisi lain, pengaruh negatif pengaturan pemerintah dalam perekonomian antara lain melalui peningkatan penerimaan pemerintah dan mekanisme transfer untuk peningkatan penerimaan pemerintah dapat mengakibatkan mis-alokasi sumber-sumber daya. Selain itu, pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan dapat memboroskan sumber daya ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah untuk hukum dan ketertiban umum mungkin pula disertai dengan penindasan. Dampak negatif ini mengurangi bahkan dapat menghapus dampak positif pengaruh pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran untuk memperkecil *gap* keahlian mengakibatkan dis-intensif dan ketergantungan pada penerimanya.

Pengeluaran pemerintah di negara-negara maju sebagian besar mendukung model Wagner, dimana akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah sebagai industri, aktivitas sektor publik merupakan substitusi dari aktivitas swasta. Sementara itu sebagian di kasus negara sedang berkembang, pengeluaran pemerintah mendukung teori dari Keynes, pengeluaran merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.4. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi suatu negara atau daerah dilihat dari strategi perdagangan yang diterapkan negara tersebut.

Strategi perdagangan disini berupa kebijakan promosi ekspor dan substitusi impor.

2.4.1. Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi

Ekspor terdiri dari berbagai macam barang atau komoditi yang tertuju ke berbagai belahan bumi atau negara, namun komposisi atau komoditi yang tertuju ke berbagai belahan bumi yang tertuju belahan bumi atau negara komposisi atau segmentasinya tidak berimbang. Misalkan komposisi barang yang diekspor didominasi oleh komoditas-komoditasnya tertentu sehingga penerimaan ekspor total bergantung pada hasil ekspor komoditas-komoditas yang dimaksud.

Dipilihnya strategi ekspor merupakan salah satu komponen pendapatan nasional dan pada hakekatnya dilandasi oleh pemikiran ekspor akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

2.5. Tenaga Kerja

Menurut pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sementara itu pada ayat (3) didefinisikan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

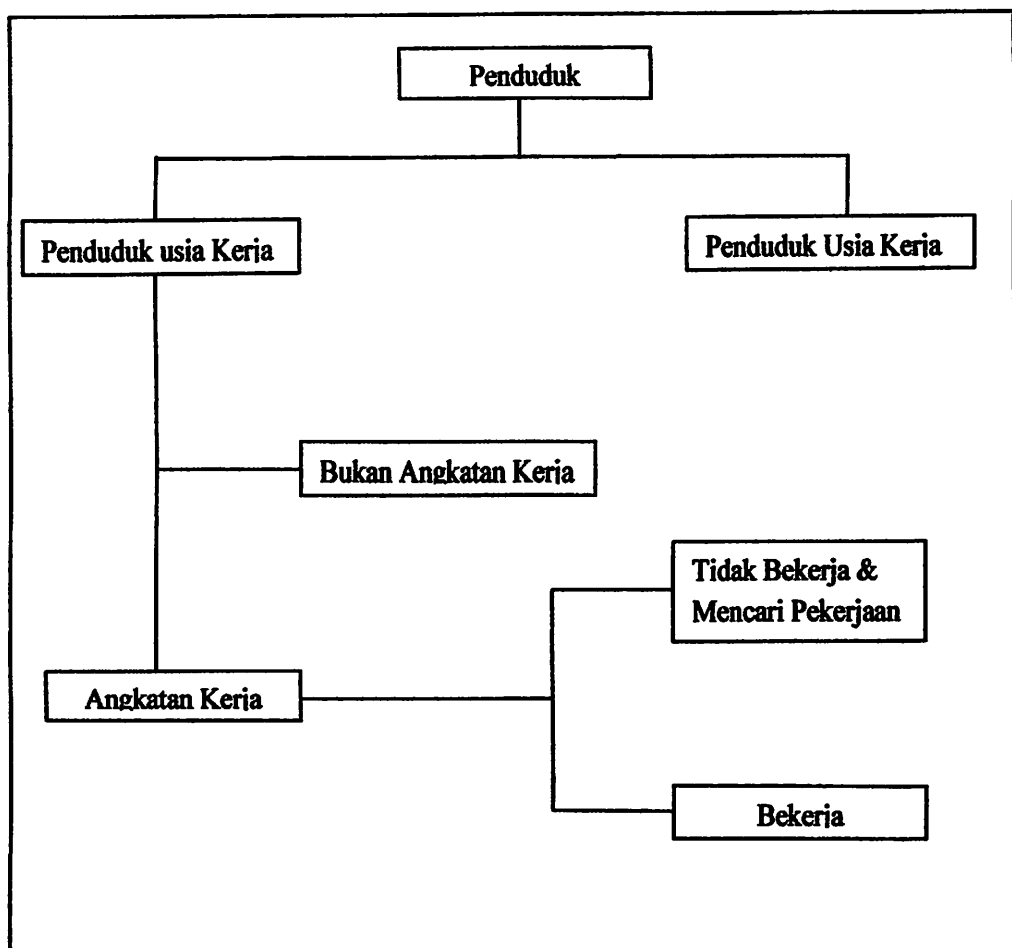
Definisi dan konsep yang digunakan dalam pengumpulan data tenaga kerja di Indonesia mengacu pada *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh

International Labor Organization (ILO) (Badan Pusat Statistik). Konsep ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi dua kelompok (Gambar 2.1), yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikutnya dalam kelompok penduduk usia kerja dibagi atas kelompok bukan angkatan kerja dan kelompok angkatan kerja. Lebih jauh lagi dalam kelompok angkatan kerja dibagi atas kelompok tidak bekerja dan mencari pekerjaan serta kelompok kerja (BPS, 2005).

Definisi yang berkaitan dengan konsep diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas/ lebih.

Gambar 2.1
Struktur Ketenagakerjaan



2. Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk berumur di bawah 15 tahun.
3. Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.
4. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
5. Tidak Bekerja dan Mencari pekerjaan adalah penduduk yang kegiatannya pada saat survei-survei sedang mencari pekerjaan, misalnya antara lain;
 - i. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - ii. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - iii. Mempersiapkan suatu usaha, dimana kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang "baru" yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/ pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
6. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksimal memperoleh/ membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan ini termasuk pula kegiatan pekerjaan tak terbayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.